

**SIKAP KOMUNITAS FILM DI SURABAYA MENGENAI BERITA
PENGESAHAN UNDANG - UNDANG PERFILMAN DI
SURAT KABAR JAWAPOS**

(Studi Deskriptif kuantitatif tentang sikap komunitas film di Surabaya mengenai
berita pengesahan undang-undang perfilman pada surat kabar JawaPos)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana pada

FISIP UPN : “Veteran” JawaTimur



Oleh:

DEWI TRI PUSPASARI
NPM. 0543010403

**YAYASAN KESEJAHTERAAN, PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
2010**

SIKAP KOMUNITAS FILM DI SURABAYA MENGENAI BERITA
PENGESAHAN UNDANG - UNDANG PERFILMAN DI
SURAT KABAR JAWAPOS

(Studi Deskriptif kuantitatif tentang sikap komunitas film di Surabaya mengenai
berita pengesahan undang-undang perfilman pada surat kabar JawaPOS)

Disusun Oleh :

DEWI TRI PUSPASARI
NPM. 0543010403

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing Utama,

JUWITO, S Sos, M.Si
NPT. 3 6704 95 00361

Mengetahui,
D E K A N

Dra.Hj.SUPARWATI,M.Si
NIP. 030 175 349

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebab oleh rahmat dan perkenanNya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul ”Sikap komunitas film di surabaya mengenai berita pengesahan undang undang perfilman di Surat kabar Jawapos”. Skripsi ini merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa / mahasiswi FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari semua pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keberhasilan dalam penyusunan proposal ini, baik secara moral maupun material, diantaranya :

1. Bapak IR. H. Didiek Tranggono, Msi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Juwito, S.sos, MSi, Ketua program studi FISIP UPN “Veteran” Jatim sekaligus Dosen pembimbing dalam proposal skripsi ini.
3. Orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa, nasehat, serta kasih sayang yang tiada hentinya.
4. My-B yang slalu jadi inspirasi penulis untuk menjadi lebih baik
5. Teman - teman kampus yang selalu setia memberi dukungan, kritik dan saran.

6. Soelastrie People's : Rio, Dhani, Anton Eboy, Johny Gerrard, Ista Negro, Indra, Amad, Topek, Sanda, Hamsyah, A2ng, Tony Tewel, BramBoed, Toby dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan menghibur penulis saat sedang jenuh.
7. Seluruh teman – teman di Ilmu Komunikasi FISIP angkatan 2005.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Komunikasi. Penulis juga menyadari jika proposal skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga kritik serta saran akan sangat membantu dan menjadi masukan yang berharga bagi penulis.

Surabaya, 17 November 2009

Dewi Tri Puspasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	14
1.4.1 Kegunaan Teoritis	14
1.4.2 Kegunaan Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Definisi Media Massa	15
2.1.2 Peran Media Massa	17
2.1.3 Definisi Surat Kabar	18
2.1.4 Surat Kabar Sebagai Kontrol Sosial	18
2.1.5 Ciri-ciri Surat Kabar	20

2.1.6	Definisi Berita	21
2.1.7	Jenis Berita	21
2.1.8	Pengaruh Media	22
2.1.9	Berita Pengesahan undang-undang Perfilman	23
2.1.10	Komunitas Film	23
2.1.11	Sikap	24
2.1.12	Efek Komunikasi Massa	25
2.1.13	Teori S – O – R	27
2.1.14	Kerangka Berpikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.1.1	Sikap komunitas film di Surabaya terhadap pengesahan undang-undang perfilman melalui pemberitaan di Jawa Pos	32
3.2	Populasi, Sampel dan Penarikan Sampel	37
3.2.1	Populasi	37
3.2.2	Penarikan Sampel	38
3.3	Metode Pengumpulan Data	38
3.4	Metode Analisis Data	39

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
4.1.1	Sejarah Berdirinya Surat Kabar Jawa Pos.....	40
4.1.2	Gambaran Umum Komunitas Film Surabaya	45

4.2 Penyajian dan Analisis Data	46
4.2.1 Identitas Responden	46
4.2.2 Usia Responden	46
4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden	47
4.3 Terpaan Surat Kabar Jawa Pos.....	48
4.3.1 Frekuensi Komunitas Komunitas Film Membaca Berita Pengesahan Undang-Undang Perfilman di Surat Kabar Jawa Pos	48
4.3.2 Sikap Komunitas Film di Surabaya Mengenai Pengesahan Undang-undang Perfilman Melalui Pemberitaan Surat Kabar Jawa Pos	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2	Usia Responden (n=100)..... 47
Tabel 4.3	Pendidikan Terakhir Responden 48
Tabel 4.6	Frekuensi Menonton Tayangan Infotainment di Televisi Dalam Satu Minggu (n=100)..... 49
Tabel 4.7	Responden mengetahui bahwa pengesahan undang- undang perfilman diwarnai penolakan dari insan film melalui pemberitaan surat kabar Jawa Pos..... 51
Tabel 4.8	Responden mengetahui bahwa masih banyak pasal yang bias dan masih perlu dikaji lagi dalam undang-undang profilman melalui pemberitaan surat kabar Jawa Pos 52
Tabel 4.9	Responden mengetahui bahwa alasan pengesahan undang-undang perfilman oleh DPR untuk mengejar deadline akhir masa jabatan 2004-2009 melalui pemberitaan di Jawa Pos 53
Tabel 4.10	Responden mengetahui alasan pengesahan undang- undang perfilman demi melestarikan film local dan untuk melindungi moral bangsa melalui pemberitaan di surat kabar Jawa Pos 55
Tabel 4.11	Aspek Kognitif Komunitas Film di Surabaya mengenai Pengesahan Undang-Undang Perfilman 56

Tabel 4.12	Responden merasa pengesahan undang undang perfilman hanya akan membunuh ide kreatif dari para pekerja film serta menghambat perkembangan film lokal	58
Tabel 4.13	Responden mendukung dengan pengesahan undang-undang perfilman demi melestarikan film lokal	59
Tabel 4.14	Responden mendukung sikap sineas film yang menolak pengesahan undang undang perfilman.....	60
Tabel 4.15	Responden kecewa karena karena sikap DPR yang terburu buru mengesahkan undang-undang perfilman demi deadline akhir masa jabatan 2004-2009.....	61
Tabel 4.16	Aspek Afektif Komunitas Film di Surabaya Mengenai Berita Pengesahan Undang-Undang Perfilman.....	62
Tabel 4.17	Jika responden anda akan melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan supaya undang undang perfilman digodok kembali.....	64
Tabel 4.18	Responden melakukan apapun yang diinginkan berkaitan dengan kegiatan film mereka dan mengabaikan undang-undang perfilman	66
Tabel 4.19	Responden akan melaporkan ke pihak berwajib atau bahkan akan mengadukan permasalahan pengesahan undang-undang perfilman ke Mahkamah Agung.....	67

Tabel 4.20	Aspek Konatif Komunitas Film Surabaya Mengenai Pengesahan Undang-Undang Perfilman	68
Tabel 4.21	Sikap Komunitas Film di Surabaya Mengenai Pengesahan Undang-Undang Perfilman Melalui Pemberitaan di Surat Kabar Jawa Pos.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Komunikasi S-O-R (Effendy, 2003 : 255)	28
Gambar 2.2 Bagan kerangka berpikir di atas menggambarkan hubungan pengaruh pemberitaan surat kabar Jawa Pos dengan sikap komunitas film di Surabaya mengenai pengesahan undang-undang perfilman	30

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	
Lampiran 2	Sikap Kognitif Komunitas Film di Surabaya Mengenai Pengesahan Undang-Undang Perfilman Melalui Pemberitaan di Surat Kabar Jawa Pos
Lampiran 3	Sikap Afektif Komunitas Film di Surabaya Mengenai Pengesahan Undang Undang Perfilman Melalui Pemberitaan di Surat Kabar Jawa Pos
Lampiran 4	Sikap Konatif Komunitas Film di Surabaya Mengenai Pengesahan Undang Undang Perfilman Melalui Pemberitaan di Surat Kabar Jawa Pos
Lampiran 5	Tabel Perolehan Total Sikap

ABSTRAKSI

DEWI TRI PUSPASARI, SIKAP KOMUNITAS FILM SURABAYA MENGENAI PENGESAHAN UNDANG UNDANG PERFILMAN MELALUI PEMBERITAAN DI SURAT KABAR JAWA POS (Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Sikap Komunitas Film Surabaya Mengenai Pengesahan Undang Undang Perfilman di Surat Kabar Jawa Pos)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap komunitas film surabaya terkait pengesahan undang undang perfilman yang diberitakan oleh harian Jawa Pos. Dalam proses pengesahannya undang undang perfilman ditentang oleh insane film, tetapi tetap disahkan oleh DPR.

Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah S-O-R, dimana media dapat mempengaruhi sikap public. Menurut teori *stimulus – organism - response* ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Dalam hal ini pemberitaan di Jawa Pos mengenai pengesahan undang undang perfilman dapat mempengaruhi sikap komunitas film.

Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah komunitas film yang berada di Surabaya dan membaca berita pengesahan undang undang perfilman dalam pemberitaan di surat kabar Jawa Pos. Teknik sampel yang digunakan adalah *total sampling*. Dimana setiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sample dalam penelitian. Setelah melalui penyaringan ditetapkan sampel dalam penelitian ini 101 orang dari populasi yang berjumlah 175 orang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai sikap netral terkait pengesahan undang undang perfilman yang diberitakan oleh surat kabar Jawa Pos. Dimana isi pemberitaanya yaitu dalam proses pengesahannya undang undang perfilman banyak ditentang oleh insan film lokal.

Keyword: Sikap, Pengesahan Undang Undang Perfilman, Komunitas Film

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia perfilman Indonesia dalam beberapa tahun ini mulai mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu terlihat setidaknya sejak tahun 2000 dimana bermunculan film yang bernuansa remaja hingga film yang horror. Animo masyarakat pun juga mulai menunjukkan minat yang positif terhadap perfilman local yang sebelumnya mereka lebih memilih film manca negara, misalnya film India, barat dan sebagainya.

Dan akhir-akhir ini minat masyarakat mulai mengarah pada film yang bertajuk religius. Terbukti dengan banyaknya film yang mengangkat tentang keagamaan. Sebut saja ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih dan banyak lagi yang lain. Para pekerja film dituntut untuk selalu kreatif dalam mengekspresikan ide mereka dalam film demi mengantisipasi kebosanan khalayak.

Memang minat khalayak sebagai sebagai penonton selalu berubah-ubah. Ada kalanya mereka menginginkan film yang betul-betul memiliki nilai social dalam kehidupan tanpa mengabaikan sisi komedi yang membuat mereka terhibur. Maka dari itu selain film yang bernuansa religius, juga banyak sekali film yang mengangkat tentang pengalaman konyol individu sehari-hari. Biasanya film komedi ini dibalut dengan kehidupan seksual, yang beberapa kalangan menganggap hal itu adalah pornografi atau pornoaksi.

Baru-baru ini Indonesia diramaikan oleh dengan pro kontra rancangan undang-undang perfilman. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan menjadi undang-undang DPR dalam rapat paripurna pada 8 september 2009. Undang-undang ini dimaksudkan guna melindungi moral serta prilaku bangsa dari berbagai hal negative yang tercermin dalam sebuah film. Selain itu undang-undang ini demi melindungi dan memelihara dunia perfilman Indonesia.

Namun undang-undang ini diwarnai dengan penolakan dari beberapa insane film kondang, mulai dari artis-artis terkenal yang sering mengisi layar kaca perfilman dan sutradara yang banyak menelurkan karya film local berkualitas. Sebutlah Dedi Mizwar, Nia Dinata, Rima Melati, Slamet Rahardjo dan sutradara film remaja Ada Apa dengan Cinta, Mira Lesmana dan Riri Reza. Mereka merasa UU Perfilman yang baru tersebut justru akan mematikan perfilman nasional yang mulai tumbuh, mematikan kreatifitas dan lebih banyak mengatur mengenai tata niaga perfilman.

Menurut beberapa insane film yang menolak terhadap disahkannya undang-undang perfilman Indonesia bahwa film merupakan gambaran dari kehidupan social, dimana masyarakat bias mengambil hikmah dari hal tersebut. Namun menurut sebagian besar anggota DPR sebaliknya, ilustrasi dalam film tersebut dikhawatirkan dapat merusak moral dan prilaku bangsa. Seperti halnya kehidupan narkoba, SARA dan sebagainya yang kemudian dapat mempengaruhi prilaku masyarakat.

Ada beberapa pasal yang diperdebatkan pada beberapa sesi talkshow di televise yang dihadiri para insane film dan anggota DPR dengan topic pro kontra undang

undang perfilman. salah satunya, Pasal 6 misalnya, mengatur secara rinci sejumlah larangan isi yang boleh ditampilkan dalam film. Film dilarang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, menonjolkan pornografi, memprovokasi pertentangan kelompok, antarsuku, dan atau antargolongan, menistakan agama, dan merendahkan harkat martabat manusia.

Yang dipertanyakan di sini ialah penafsiran tentang apa-apa saja yang dapat mendorong khalayak melakukan tindakan seperti yang disebutkan di atas? Apakah tidak boleh menampilkan adegan orang mengkonsumsi narkoba, misalnya? Lalu bagaimana dengan film yang memang harus menampilkan adegan tersebut sebagai nilai edukasinya? Hal yang demikianlah yang menurut para sineas RUU Perfilman menjadi kontraproduktif.

Film impor ataupun pembuatan film oleh pihak asing juga sepertinya dibatasi. Terlihat dari beberapa pasal yang mengacu pada hal tersebut, diantaranya:

Pasal 13 mengatur pengedaran film impor tak boleh melebihi 50 persen. Pada pasal 32, diatur pula pertunjukan film Indonesia sekurang-kurangnya 50 persen dari seluruh jam pertunjukan film, kecuali dalam hal sediaan film Indonesia tidak cukup.

Pasal 23 mengatur pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 42 mengatur pula, pemerintah wajib mencegah masuknya film impor yang berpengaruh negatif terhadap nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Maka dari itu, banyak pihak khususnya para insane film yang merasa bahwa undang undang tersebut harus lebih dikaji lagi, Jadi tidak perlu terburu-buru. Sedangkan pengesahan undang undang tersebut didasarkan pada deadline masa akhir jabatan anggota DPR periode 2004-2009. Hal ini menunjukkan spekulasi bahwa anggota DPR yang sudah didaulat sebagai wakil rakyat dalam pengesahan undang undang perfilman hanya untuk menggenapkan laporan akhir masa jabatan mereka. sedangkan ungkapan tersebut yang dilontarkan oleh perwakilan anggota DPR dalam sebuah sesi acara di salah satu stasiun televise nasional.

Pada undang-undang perfilman sebelumnya, yang lebih dititik beratkan adalah masalah pornografi dan pornoaksi sehingga banyak film yang gagal tayang, tapi tak sedikit pula yang sukses tayang dan menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini menggambarkan lemahnya Lembaga Sensor Film (LSF) yang menyeleksi setiap film yang akan tayang dan akan dikonsumsi public. Maka dari itu disahkannya undang-undang yang berkualitas harus diimbangi dengan SDM yang tegas pula, sehingga adanya undang-undang tersebut betul-betul efisien dan efektif.

Perfilman di Negeri ini memang sedang berkembang, mengingat besarnya animo masyarakat terhadap film local. Sebenarnya hal tersebut sudah mulai terlihat sejak akhir-akhir tahun belakangan ini, misalnya film remaja Ada Apa

Dengan Cinta dan baru-baru ini film bernuansa religi Ayat Ayat Cinta serta masih banyak film lainnya. Hal ini tentu saja membuat para insane film lebih terpacu untuk menghasilkan karya yang lebih bagus lagi, sehingga dapat memuaskan konsumen, yang dalam hal ini masyarakat.

Film memang menjadi salah satu alternative masyarakat dalam mencari hiburan, terlebih lagi masyarakat kota. Setiap akhir pekan bias kita perhatikan di gedung-gedung bioskop ibu kota dipenuhi dengan mereka yang ingin melepaskan ketegangan dengan menonton film, padahal tiket masuk terbilang mahal. Namun harapan setiap penonton film tersebut sama, yaitu mendapatkan tontonan yang berkualitas dan tentunya memuaskan.

Tetapi pengesahan undang-undang perfilman sedikit banyak akan mempengaruhi hasil karya insane film berikutnya. Penolakan terhadap pengesahan undang-undang perfilman ini banyak datang dari insane film kondang yang banyak menghasilkan karya berkualitas dan patut dibanggakan. Secara terang-terangan mereka beranggapan bahwa disahkannya undang-undang perfilman dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh perfilman Indonesia. Namun tetap saja DPR mempunyai asumsi bahwa undang-undang tersebut untuk mengayomi dunia perfilman local. Berarti kalau sudah seperti itu masyarakat kita akan memilih untuk menonton film manca Negara.

Pro kontra mengenai pengesahan undang-undang perfilman ini juga terjadi didalam gedung DPR antara beberapa perwakilan dari setiap fraksi. Beberapa fraksi menolak disahkannya undang-undang tersebut, karena banyaknya ketidak sesuaian dalam setiap pasalnya, misalnya perwakilan dari fraksi PDI-P.

Menurutnya undang-undang ini memang lebih baik dari undang-undang sebelumnya, tetapi masih banyak pasal yang kurang sesuai. Namun karena lebih banyaknya suara dari setiap perwakilan fraksi di DPR yang mendukung, sehingga akhirnya undang-undang yang mengatur tentang perfilman pun disahkan.

Kondisi seperti ini pun dimanfaatkan media untuk berita yang kemudian disebarkan ke khalayak lusa. Setiap media berlomba-lomba untuk memberitakan hal tersebut secara bersamaan, tentunya dengan kemasan dan perspektif yang berbeda. Ada media yang lebih menekankan pada pihak yang pro, dan ada pula yang mengambil penekanan pada mereka yang kontra terhadap undang-undang tersebut. Sebagai media massa penyampai informasi, pers juga mempunyai kekuatan besar untuk mempengaruhi public. Mereka dapat mempengaruhi pola pikir para penontonnya yang awalnya setuju menjadi tidak setuju, yang awalnya suka menjadi tidak suka dan sebaliknya.

Komunikasi massa merupakan proses komunikasi melalui media massa modern, dengan kata lain media massa bisa diartikan sebagai suatu proses dimana komunikator secara professional menggunakan media massa dalam menyebarkan pesannya untuk mempengaruhi khalayak banyak. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah banyak dengan menggunakan media (Effendi, 2000:79-80)

Teori dasar yang diungkapkan Laswel tentang komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk menghasilkan efek. (Pengantar Ilmu Komunikasi, Deddy Mulyana). Efek terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kognitif

Melalui komunikasi komunikan mendapatkan pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Pengaruh komunikasi ini hanya mempengaruhi komunikan dari tidak tahu menjadi tahu.

2. Afektif

Pengaruh komunikasi terhadap perasaan komunikan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu perasaan suka atau tidak suka atas informasi yang disampaikan oleh komunikator.

3. Konatif

Dalam tahap ini komunikan cenderung melakukan tindakan nyata karena pengaruh terpaan komunikasi.

Seorang komunikator dapat dikatakan efektif dalam penyampaian pesannya jika sudah menghasilkan tiga efek diatas dari komunikannya. Artinya pesan yan disampaikan komunikator kepada komunikan dapat ditangkap dengan baik, sehingga kemungkinan besar akan menghasilkan efek yang diharapkan.

Kegiatan komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media massa. Media massa tersebut adalah pers, radio, televisi, film, dan lain – lain. Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan bahkan termasuk media massa elektronik, radio, siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni, surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita. (Effendy, 1993 : 145)

Media komunikasi banyak jumlahnya, mulai dari yang tradisional sampai yang modern, misalnya kentongan, bedug, pagelaran kesenian, surat, papan pengumuman, telepon, telegram, pamflet, poster, spanduk, surat kabar, majalah, film, radio, dan televisi yang pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai *media tulisan* atau *cetakan*, *visual*, *aural*, dan *audio-visual*. Untuk mencapai sasaran komunikasi dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media, tergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. (Effendy, 2003:37)

Di antara beberapa jenis media tersebut, media cetak seperti surat kabar memiliki ciri khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting bukan hanya sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi khalayak yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasif seperti kalau mereka diterpa media radio, televisi dan film. (Effendy, 2000:313).

Pesan melalui media cetak diungkapkan dengan huruf-huruf mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak berperan secara aktif. Karena itu berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain, pada media cetak harus disusun sedemikian rupa, sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan media cetak lainnya, ialah bahwa media ini dapat di kaji ulang, didokumentasikan, dan dihimpun untuk kepentingan pengetahuan, serta dapat dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi. (Effendy, 2000: 313-314).

Media memiliki kemampuan dalam membeberkan suatu fakta bahkan membentuk opini masyarakat. Salah satu media yang secara gamblang dan lebih

rinci dalam pemberitaannya adalah surat kabar, sebagaimana diungkapkan oleh Djuroto (2002:11) bahwa :

“Surat kabar merupakan kumpulan dari berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak ke dalam lembaran kertas ukuran plano yang diterbitkan secara teratur dan bisa terbit setiap hari atau seminggu sekali.”

Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang dinilai lebih *up to date* dalam menyajikan berita-berita yang akan disampaikan kepada khalayak. Beberapa kelebihan dari surat kabar diantaranya yaitu bisa disimpan lebih lama atau dapat diulang dan jelas, berbeda dengan media elektronik yang hanya bisa menginformasikan sepiantas dan membutuhkan perhatian dari komunikan untuk bisa memahami isi dan pesan.

Surat kabar berbeda dengan media elektronik dalam hal kecepatan penyampaian informasi ke masyarakat, informasi lewat media elektronik seperti radio dan televisi lebih bisa menyiarkan informasi dalam waktu beberapa menit setelah informasi tersebut ditemukan, dan surat kabar harus menunggu beberapa jam disampaikan kepada masyarakat namun surat kabar mempunyai metode sendiri untuk menarik perhatian masyarakat dengan versi cerita yang lebih mendalam, surat kabar berani untuk tampil berbeda, berita eksklusif dari surat kabar yang sulit dikalahkan oleh media elektronik.

Surat kabar tidak hanya saja sebagai pencarian informasi yang utama dalam fungsinya, tetapi bisa juga mempunyai suatu karakteristik yang menarik yang perlu diperhatikan untuk memberikan analisis yang sangat kritis yang akan

menumbuhkan motivasi, mendorong serta dapat mengembangkan pola pikir bagi masyarakat untuk semakin kritis dan selektif dalam menyikapi berita-berita yang ada di dalam media khususnya surat kabar. Namun tidak setiap informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Setiap informasi yang tidak memiliki nilai berita, menurut pandangan jurnalistik tidak layak untuk dimuat, disiarkan atau ditayangkan media massa. Hanya informasi yang memiliki nilai berita atau memberi banyak manfaat kepada publik yang patut mendapat perhatian media (Sumadiria, 2005:86).

Untuk membuat informasi menjadi lebih bermakna biasanya sebuah media cetak melakukan penonjolan-penonjolan terhadap suatu berita. Dalam pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2001:163).

Assegaff (1983 : 5) mengemukakan : “Berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian pembaca”. Sedangkan menurut Charnley, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. (Romli, 2005 : 5).

Terdapat empat unsur yang dikenal sebagai nilai – nilai berita (Romli, : 2005 : 5).

- a. Cepat : berarti ketepatan waktu atau aktual. Berita adalah sesuatu yang baru, yang belum diketahui sebelumnya.

- b. Nyata : berarti fakta (bukan karangan ataupun fiksi). Didalamnya terdapat kejadian nyata, pendapat dan pernyataan sumber berita atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan apa adanya.
- c. Penting : berarti menyangkut kepentingan orang banyak (berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, dinilai perlu diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak).
- d. Menarik : berarti mengundang orang untuk membaca berita yang ditulis dan dimuat dalam media cetak. Selain berita yang menarik perhatian pembaca, aktual, dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak, berita bersifat menghibur atau lucu juga dibutuhkan oleh masyarakat luas atau para pembaca. Berita yang mengandung keganjilan atau keanehan, bahkan berita yang menyentuh emosi atau menggugah perasaan (human interest) juga diperlukan.

Seperti halnya pada kasus-kasus pro kontra sebelumnya, misalnya tentang pengesahan RUU pornografi yang terbilang alot dan sempat melibatkan banyak kalangan saling bertentangan, namun saat ini penerapannya dipertanyakan. Begitu juga dengan disahkannya undang-undang perfilman yang sempat ramai diberitakan oleh setiap media massa cetak atau elektronik nasional yang menyebabkan munculnya kecemasan dari masyarakat. Terlebih lagi bagi para komunitas kecil atau besar film tentang masa depan perfilman Indonesia yang sedang berkembang, tetapi diwarnai dengan konflik DPR sebagai pembuat undang-undang dan insane film ternama sebagai pelaku film.

Media sangat berperan besar dalam mempengaruhi dan menentukan sikap khalayak. Setiap pemberitaan dalam media akan memunculkan perubahan yang signifikan bagi para pembaca atau penontonnya. Menyadari akan hal itu setiap media pun berusaha untuk menampilkan informasi yang akurat bahkan cenderung mendramatisir. Setiap berita atau informasi dikemas sedemikian rupa dan kemudian ditampilkan dengan cara berbeda demi menarik perhatian khalayak. Terkait pro kontra undang-undang perfilman hampir semua media, khususnya media cetak berlomba-lomba untuk memberitakan isu tersebut secara serentak.

Bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat kota film hampir menjadi kebutuhan yang mempunyai porsi pemenuhan berbeda. Yaitu dalam hal mencari hiburan atau melepaskan ketegangan dari rutinitas mereka sehari-hari. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika para insane film bersaing untuk memberikan suguhan menarik dalam setiap karya mereka. Tidak dapat dipungkiri pada akhirnya untuk dapat menilai film berkualitas atau tidak adalah dengan melihat animo khalayak dalam menonton sebuah film. Ketika undang-undang perfilman disahkan praktis para insane film merasa ide kreatif mereka dibatasi oleh norma hukum.

Melihat efek yang bisa ditimbulkan oleh media massa, dalam hal menyampaikan informasi atau pesan yang bertemakan pro kontra undang-undang perfilman, maka peneliti melihat adanya fenomena yang menarik untuk dibahas, dimana media massa bisa menjadi sumber informasi yang bisa menambah pengetahuan bagi penontonnya dan bukan hal yang tidak mungkin media massa dapat mempengaruhi sikap pembaca atau penontonnya, yakni masyarakat. Oleh

karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap komunitas film di Surabaya terhadap pemberitaan pengesahan undang-undang perfilman di media massa dengan melihat bagaimana berita tersebut dikemas dan disajikan oleh media kepada *audience*-nya.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bergabung dalam sebuah komunitas perfilman, baik dalam skala kecil atau besar. Hal ini cukup beralasan, mengingat mereka adalah merupakan pelaku atau otak dibalik sebuah film. Selain itu tidak sedikit pula bagi mereka yang menyandarkan masa depan mereka dalam dunia perfilman. Sedangkan lokasi penelitian adalah kota Surabaya yang merupakan ibu kota terbesar kedua setelah Jakarta. Banyak seniman yang terjun dalam dunia film berasal dari Surabaya, selain itu komunitas kecil perfilman atau teatre juga seringkali kita jumpai, misalnya disanggar teatre atau bahkan universitas di Surabaya yang mempunyai ekskul film. Surabaya juga mempunyai beberapa komunitas pecinta film, yaitu *Q-community* yang selalu aktif dalam pengadaan *event* film indie di Surabaya. Komunitas ini diresmikan sejak 2007, padahal proposal yang di ajukan pada *Q-community* Jakarta sudah dari 2004. Selain itu juga terdapat komunitas film AWS “KOPI” yang aktif dalam kegiatan perfilman, misalnya pengadaan film indie.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

Bagaimana Sikap komunitas film di Surabaya mengenai pengesahan undang-undang perfilman melalui pemberitaan di surat kabar Jawa Pos?

“studi deskriptif kuantitatif mengenai sikap komunitas film di Surabaya mengenai pengesahan undang undang perfilman melalui pemberitaan di surat kabar Jawa Pos”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Sikap komunitas film di Surabaya mengenai pengesahan undang-undang perfilman melalui pemberitaan di surat kabar Jawa Pos.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Sebagai bahan tambahan pemikiran untuk ilmu komunikasi terutama topik bahasan yang berhubungan dengan Sikap komunitas film di Surabaya terhadap pemberitaan mengenai pro kontra undang-undang perfilman, khususnya media massa cetak dan sebagai bahan pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat bahwa media massa cetak seperti surat kabar merupakan bentuk media yang perlu perhatian, pengertian dan pemikiran yang luas didalam penyajiannya, terutama dalam penyajian informasi tentang sesuatu yang berbaur pro kontra.